

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Ali Ahmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2006, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Cipta Jaya, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai permasalahan*, Cipta Jaya, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2009, *Kewenangan Pemerintahan di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Effendi Perangin, tt, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

*Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 4, Jakarta

1992, *Praktek Pengurusan Sertipikat*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Florianus SP. Sangsun, 1997, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*. Trans media Pustaka, Jakarta,

Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju, Cetakan 1, Bandung

J.B. Soesanto, *Hukum Agraria I*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang

Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

*Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria.*, Andi Offset Yogyakarta,

Masri Singarimbun, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Mudjiono, 1992, *Hukum Agraria*, Yogyakarta.

Muchsin,dkk, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung

Muhammad Yamin Lubis dan abd.Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju Bandung

Mustafa Bachsan, 1984, *Hukum Agraria Dalam perspektif*, Remaja Karya, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pieter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedjono dan H.Abdurrahman, 2008, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soetomo, 1981, *Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang.

Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Tampil Ansari Siregar, 2005, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Multi Grafik, Medan.

Urip Santoso, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta

Yudhi Setiawan, 2009, *Instrumen Hukum campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2010, *Hukum Pertanahan, Teori dan Praktik*, Bayumedia Publishing, Malang.

## **B. Karya Ilmiah/Jurnal**

Edy Suparyono, 2008, *Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur*, Tesis Hukum, FH UNDIP

**Rahmad Hendra**, *Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Tanah Dalam Kaitan Dengan Pembatalan Sertifikat Oleh Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 1 Februari 2011 Jurnal. Hal.249

Lalu Buhari Hamni, 2012, *Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Mataram, 2012, hal. 13-14

Maria Emaculata Noviana Ira Hapsari, 2006, *Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 10/G/TUN/2002/PTUN.SMG, Studi Kasus Sertifikat ganda/"Overlapping' di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang*). Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, FH UNDIP

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1989 Tentang Penggunaan Blangko Sertipikat Yang Baru

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

#### **D. WAWANCARA**

Wawancara dengan Sri Wahyuni, SH.MH pemilik sertifikat pengganti di Kantor Pertanahan kota Semarang pada tanggal 03 Agustus 2016

Wawancara dengan Dr. Ngadino,SH., MH. Notaris dan PPAT kota Semarang pada tanggal pada tanggal 01 Agustus 2016

Wawancara dengan Rr.Rani Rissananti, SH, kepala sub bagian tata usaha Kantor Pertanahan kota Semarang pada tanggal 08 Agustus 2016.